

**IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
DAERAH (SIMDA) KEUANGAN PADA BADAN
PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH (BPPRD) KOTA MEDAN**

SKRIPSI

OLEH

DESI MARIANA BR. SIMAMORA

178520050



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)27/12/21

**IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
DAERAH (SIMDA) KEUANGAN PADA BADAN
PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH (BPPRD) KOTA MEDAN**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Salah satu Syarat untuk memperoleh Gelar
Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area**

OLEH :

DESI MARIANA BR. SIMAMORA

178520050

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)
Keuangan Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
(BPPRD) Kota Medan.

Nama Mahasiswa : Desi Mariana Br. Simamora

NPM : 178520050

Program Studi : Administrasi Publik



LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang saya kutip dari berbagai sumber, telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika dalam penulisan karya ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh sewaktu-waktu dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, Mei 2021



Desi Mariana Br. Simamora
178520050

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Desi Mariana Br. Simamora
NPM : 178520050
Program Studi : Administrasi publik
Fakultas : Ilmu sosial dan ilmu politik
Jenis Karya : Skripsi

Dengan pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Nonekslusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan. Dengan Hak Bebas Royalti Eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, Mei 2021



Desi Mariana Br. Simamora
178520050

ABSTRAK

IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) KEUANGAN PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (BPPRD) KOTA MEDAN

Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) keuangan merupakan suatu program aplikasi yang ditunjukan untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Fenomena pada penelitian ini yaitu gangguan koneksi jaringan internet pada SIMDA keuangan versi 2.7. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi SIMDA keuangan versi 2.7 dan kendala dalam implementasi SIMDA keuangan versi 2.7 di Sub Bagian Keuangan BPPRD kota Medan. Peneliti menggunakan teori implementasi menurut George C. Edward III yaitu (komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi). Jenis penelitian yaitu penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu kepala sub bagian keuangan dan staff pegawai PNS dan Non PNS. Data dikumpulkan berdasarkan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) keuangan versi 2.7 pada sub bagian keuangan BPPRD kota Medan sudah berjalan dengan baik dan para staff pegawai juga sudah memahami dalam pengoperasian SIMDA tersebut. Namun yang menjadi kendala pada Implementasi ini yaitu gangguan koneksi jaringan internet sehingga mengganggu pekerjaan pada saat melakukan penginputan data.

**Kata Kunci : Implementasi, Sistem Informasi Manajemen Daerah
Keuangan**

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE FINANCIAL REGIONAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (SIMDA) IN THE AGENCY REGIONAL TAX AND RETRIBUTION MANAGEMENT (BPPRD) MEDAN CITY

The Regional Management Information System (SIMDA) finance is an application program that is intended to assist local governments in managing their regional finances. This study aims to determine how the implementation of financial SIMDA version 2.7 and obstacles in implementation financial SIMDA version 2.7 in the Sub-Division of Finance BPPRD Medan city. Researchers used the theory of George C. Edward III regarding implementation, namely (communication, resources, dispositions and bureaucratic structures). This type of research is descriptive qualitative research. The sources of data in this study are the head of sub-section of finance and staff of civil servants and non civil servants. Data were collected based on data collection techniques, namely observation, interviews and documentation. The informants in the study were the Head of Sub Division of Finance and financial staff. As for the results of the study showed that the implementation of the regional management information system (SIMDA) version 2.7 in the financial sub-section of the Medan City BPPRD has gone well and the staff have also understood the operation of the SIMDA. but the problem with this implementation is the disruption of the internet network connection so that it interferes with work when inputting data.

Keywords: Implementation, Management Information Systems Regional Finance.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Desi Mariana Br. Simamora, anak dari Suhut Simamora dan Ropika Situmorang. Lahir di Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau pada tanggal 20 september 1999. Penulis merupakan anak ke 2 (dua) dari 6 (enam) bersaudara.

Penulis mengawali pendidikan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 002 Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang pada tahun 2005. Kemudian melanjutkan ke jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 6 Tanjungpinang pada tahun 2011. Selanjutnya penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 4 Tanjungpinang pada tahun 2014. Pada tahun 2017 sampai sekarang penulis terdaftar sebagai mahasiswa program studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Selama mengikuti perkuliahan penulis melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan serta melakukan penelitian dalam penyusunan skripsi di BPPRD Kota Medan khususnya pada Sub Bagian Keuangan, dengan judul skripsi “Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan”.

KATA PENGANTAR

Dengan Kasih dan Rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, Penulis mengucapkan puji syukur karena penulis telah menyelesaikan skripsi ini. Adapun judul dalam skripsi ini **“Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan”**. Skripsi ini merupakan syarat untuk meraih gelar Strata satu (S1) Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa adanya keterbatasan kemampuan dan wawasan penulis, sehingga penulis menerima masukan dan saran dari semua pihak. Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan, bimbingan, arahan dan dukungan baik dari segi moral maupun material. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng. M. Sc selaku Rektor di Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Heri Kusmanto, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area.
3. Ibu Nina Angelia, S.Sos, M.Si, selaku Ka. Prodi Administrasi Publik.
4. Bapak (Alm) Dr. Abdul Kadir, S.H, M.Si, selaku Pembimbing I yang telah membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Beby Masitho Batubara, S.Sos, M.AP, selaku Pembimbing I yang telah membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Agung Suharyanto, S.Sn, M.Si, selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.

7. Ibu Chairika Nasution, S.AP, M.AP, selaku Sekretaris Sidang Ujian Skripsi, yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan saran dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area yang telah mengajar dan mendidik Penulis.
9. Seluruh Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu penulis dalam urusan administrasi serta memberikan perkembangan informasi mengenai jadwal dalam pelaksanaan setiap acara kegiatan atau aktivitas di dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Untuk seluruh pegawai perpustakaan yang telah memberikan pelayanan terbaik pada saat peminjaman buku.
11. Kepada yang sangat istimewa bagi penulis yaitu kedua orang tua, Bapak Suhut Simamora dan Ibu Ropika Situmorang yang telah memberikan semangat, motivasi dan doa yang tiada henti untuk keberhasilan dan masa depan saya serta membiayai segala sesuatu yang dibutuhkan oleh penulis.
12. Kepada Abang saya Josua Simamora dan Adik-Adik saya Halasson Simamora, Doharman Simamora, Valentino Simamora, dan Girvan Simamora yang selalu memberikan doa dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
13. Ibu Dra. Fitriati Hasibuan, MM selaku Kepala Sub Bagian Keuangan BPPRD Kota Medan yang telah meluangkan waktu dan pemikirannya dalam memberikan informasi tentang penelitian skripsi penulis.
14. Semua informan-informan yang membantu memberikan informasi dalam penelitian penulis yaitu Bapak Alfa Rheza Daulay S.E, M.Si, Bapak M. Lutfi

S.E, Bapak Fauzan Shaufi S.H, Bapak Andy S.E dan Ibu Maslina Fitriyanti Siregar, S.E.

15. Sahabat-sahabat saya Lora Marsa Hutahaean, Lastrida Simbolon, Mela Dwi Valensia Elvira Sianipar, Nija Pera Tanti dan Suci Rahmadani Hsb yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam penulisan skripsi ini.

16. Teman-teman mahasiswa Administrasi Publik Stambuk 17 yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat, akhir kata penulis mengucapkan terimakasih.

Medan, Mei 2021

Penulis



Desi Mariana Br. Simamora
178520050

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
RIWAYAT HIDUP	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR BAGAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Fokus Penelitian.....	4
1.5. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1. Uraian Teoritis	6
2.1.1. Pengertian Implementasi	6
2.1.2. Model Implementasi.....	8
2.1.3. Pengertian Sistem Informasi Manajemen.....	13
2.1.4. Sistem Informasi Manajemen Keuangan	14
2.1.5. Pengertian Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA).....	15
2.1.6. Unsur SIMDA	16
2.1.7. Tujuan SIMDA.....	16
2.1.8. Aplikasi SIMDA Keuangan	17
2.2. Penelitian Terdahulu	20
2.3. Kerangka Pemikiran	25
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1. Jenis Penelitian	28
3.2. Lokasi Dan Waktu Penelitian	29
3.3. Informan Penelitian	30
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.5. Metode Analisis Data.....	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	36
4.1. Hasil Penelitian	36
4.1.1. Sejarah Singkat Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan	36
4.1.2. Visi dan Misi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan	40
4.1.3 Struktur Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan	40
4.2. Pembahasan Penelitian.....	43
4.2.1. Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah	

(SIMDA) Keuangan versi 2.7 pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan	43
4.2.2. Kendala dalam Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan versi 2.7 pada Sub bagian Keuangan BPPRD Kota Medan.....	58
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	62
5.1. Simpulan	62
5.2. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN	
Lampiran 1: Dokumentasi Penelitian	
Lampiran 2: Data Informan	



DAFTAR BAGAN

Halaman

Bagan 2.3. Kerangka Pemikiran.....	27
Bagan 4.1.3. Struktur Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan.....	42



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan tidak lepas dari peran pemerintah daerah yang ada di dalamnya, karena dukungan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah menjadi faktor penting dari keberhasilan pembangunan itu sendiri. Mengacu pada Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dengan asas desentralisasi, atau yang lebih dikenal dengan nama otonomi daerah.

Otonomi daerah juga memberi kewenangan pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan, melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri. Pemerintah daerah dituntut untuk lebih meningkatkan kinerja dan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabilitas. Hal ini diperlukan dalam rangka agar terwujudnya kualitas laporan keuangan yang baik guna mencapai suatu sistem tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*).

Pada era globalisasi saat ini, instansi pemerintah daerah dituntut untuk dapat memanfaatkan kemajuan Teknologi Informasi (TI) dalam meningkatkan kinerja pegawai khususnya dalam hal laporan keuangan. Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah, maka pemerintah daerah diwajibkan menerapkan SAP berbasis akrual paling lambat mulai tahun anggaran

2015. Untuk mendukung peraturan tersebut dibutuhkan suatu sistem yang dapat diandalkan (*reliable*), sistem yang mampu mengolah data-data (*input*) dan menghasilkan informasi (*output*) yang dapat digunakan untuk manajemen dalam pengambilan keputusan. Melalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengeluarkan sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi yang dapat membantu pemerintah daerah menghasilkan informasi keuangan yang relevan, cepat, akurat, lengkap, dan dapat di uji kebenarannya, sistem tersebut yaitu Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) keuangan. Sistem ini terdiri dari beberapa versi, namun yang berbasis akrual ialah versi 2.7 sebagai penyempurnaan dari versi-versi sebelumnya. Hal ini dikarenakan dinamika perubahan regulasi yang bersifat dinamis dan fleksibel memiliki pengaruh penting terhadap setiap pengembangan aplikasi SIMDA keuangan, agar dapat mengikuti setiap perubahan regulasi dari masing-masing *stakeholder*.

Situs resmi BPKP menjelaskan bahwa aplikasi SIMDA keuangan dirancang dan dikembangkan oleh BPKP khususnya produk dari deputi IV yaitu bidang pengawasan penyelenggaraan keuangan daerah. Aplikasi SIMDA muncul setelah adanya keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 tahun 2003 tentang pedoman umum perkantoran Elektronik Lingkup Intranet di lingkungan instansi pemerintah. Selain itu penerapan aplikasi SIMDA juga didukung dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2008 tentang pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengembangan SIMDA. (www.bpkp.go.id)

Menurut data BPKP sampai tanggal 30 juni 2020, Program aplikasi SIMDA keuangan telah di implementasikan pada 395 pemerintah daerah. Salah

satu pemerintah daerah yang telah mengimplementasikan SIMDA keuangan yaitu sub bagian keuangan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan. Aplikasi SIMDA keuangan dapat digunakan sebagaimana mestinya apabila didukung akses jaringan internet, fenomena yang diamati oleh peneliti pada sub bagian keuangan BPPRD kota Medan salah satu pegawai harian lepas (PHL) dan sebagai operator SIMDA keuangan yaitu Bapak Andy S.E mengatakan SIMDA keuangan sudah di implementasikan pada tahun 2016 menggunakan SIMDA keuangan versi 2.7 hingga saat ini. Adapun yang menjadi masalah pada gangguan koneksi jaringan internet sehingga menyebabkan proses penginputan data menjadi tertunda dan rentan mengakibatkan kesalahan dalam menginput data (wawancara, 18 november 2020).

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis ingin melakukan penelitian tentang **“Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan penulis, maka rumusan masalah yang akan di kaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) keuangan versi 2.7 pada sub bagian keuangan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) kota Medan ?

2. Bagaimana kendala dalam implementasi sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) keuangan versi 2.7 pada sub bagian keuangan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) kota Medan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) keuangan versi 2.7 pada sub bagian keuangan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) kota Medan.
2. Untuk mengetahui kendala dalam implementasi sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) keuangan versi 2.7 pada sub bagian keuangan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) kota Medan.

1.4. Fokus Penelitian

Peneliti menyadari adanya keterbatasan baik waktu, tenaga dan dana. Supaya hasil penelitian lebih berfokus maka peneliti tidak melakukan penelitian terhadap keseluruhan SIMDA keuangan, tetapi perlu menentukan fokus. Berdasarkan latar belakang masalah maka yang menjadi fokus penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah mengenai implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) keuangan versi 2.7 pada sub bagian keuangan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) kota Medan.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh penulis dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pengembangan pengetahuan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian lebih lanjut, khususnya dalam implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) keuangan versi 2.7

2. Secara praktis

Dari hasil penelitian, diharapkan dapat memperoleh manfaat praktis sebagai berikut :

a. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam menggunakan ilmu pengetahuan dan teori yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan.

b. Bagi civitas akademik

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi kalangan akademis dalam Implementasi SIMDA keuangan serta dapat menjadi acuan pada penelitian selanjutnya yang relevan atau sejenis.

c. Bagi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya pada Sub Bagian Keuangan BPPRD Kota Medan dalam menjalankan implementasi SIMDA Keuangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Uraian Teoritis

2.1.1. Pengertian Implementasi

Implementasi merupakan tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun dengan baik dan matang. Menurut Antonius Tarigan dalam Mulyadi (2016:47) implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada program tertentu. Menurut Silalahi dalam Kadir (2020:75) implementasi kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan.

Lebih lanjut Mazmanian dan Sabatier dalam Solichin (2020:135)

“Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”.

Menurut Jones dalam Muda (2019:76)

“Implementasi kebijakan merupakan suatu proses kebijakan yang dapat dilakukan dengan mudah, namun dalam pelaksanaannya menuntut adanya syarat antara lain adanya orang atau pelaksana, uang dan kemampuan organisasi. Dan selanjutnya memberikan rumusan batasan implementasi sebagai proses penerimaan sumber daya tambahan sehingga dapat mempertimbangkan apa yang harus dilakukan”.

Menurut Zainal Abidin dalam Mulyadi (2016:25) terdapat pendekatan dalam implementasi kebijakan publik, antara lain :

1) Pendekatan Struktural

Pendekatan ini melihat peran institusi atau organisasi sebagai sesuatu yang sangat menentukan. Jika organisasi dianggap tidak sesuai dengan wujud perubahan yang muncul dari kebijakan, maka perlu dilakukan :

- *Planning of change*, yakni perencanaan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan untuk melakukan perubahan yang bersifat internal organisasi.
- *Planning for change*, yakni perencanaan tentang perubahan organisasi untuk menghadapi perubahan dari luar.

2) Pendekatan prosedural/manajerial

Pendekatan ini melihat implementasi dalam bentuk langkah-langkah yang ditempuh dalam pelaksanaan (*planning, programming, budgeting, supervision, atau programming, evaluation, review technique*). Yang paling penting dalam proses implementasi adalah prioritas dan tata urutan.

3) Pendekatan kewajiban/behavior

Pendekatan ini berhubungan dengan penerimaan atau penolakan masyarakat terhadap suatu kebijakan. Penerimaan masyarakat terhadap kebijakan tidak hanya ditentukan oleh isi atau substansi kebijakan, tetapi juga oleh pendekatan dalam penyampaian dan cara mengimplementasikannya.

4) Pendekatan politik

Keberhasilan suatu kebijakan ditentukan oleh kemauan dan kemampuan dari kekuatan-kekuatan dominan dalam masyarakat atau dalam organisasi.

Menurut Zainal Abidin dalam Mulyadi (2016:26) proses implementasi berkaitan dengan dua faktor utama; Faktor utama internal dan faktor utama eksternal. Faktor

utama internal yaitu kebijakan yang akan diimplementasikan. faktor utama eksternal yaitu kondisi lingkungan dan pihak-pihak terkait. Kondisi kebijakan adalah faktor yang paling dominan dalam proses implementasi karena yang di implementasikan kebijakan itu sendiri.

2.1.2. Model Implementasi

A. Model Implementasi George C. Edward III

Menurut George C. Edward III dalam Mulyadi (2016:68) terdapat 4 (empat) variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. Secara umum dalam Winarno (2012:178-181) Edward membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan yakni transmisi, konsistensi dan kejelasan (*clarity*).

- a. Transmisi, faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah transmisi. Sebelum mengimplementasikan suatu keputusan, harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Ada beberapa hambatan yang timbul dalam

mentransmisikan perintah-perintah implementasi. Pertama, pertentangan pendapat antara para pelaksana dengan perintah yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan. Pertentangan terhadap kebijakan ini akan menimbulkan hambatan-hambatan atau distorsi seketika terhadap komunikasi kebijakan, hal ini terjadi karena para pelaksana menggunakan keleluasaan yang tidak dapat mereka elakkan dalam melaksanakan keputusan-keputusan dan perintah-perintah umum. Kedua, informasi melewati berlapis-lapis hierarki birokrasi. Birokrasi mempunyai struktur yang ketat dan cenderung sangat hierarkhis, kondisi ini sangat mempengaruhi tingkat efektivitas komunikasi kebijakan yang dijalankan. Penggunaan sarana komunikasi yang tidak langsung dan tidak adanya saluran-saluran komunikasi yang ditentukan mungkin juga mendistorsikan perintah-perintah pelaksana. Ketiga, pada akhirnya penangkapan komunikasi-komunikasi mungkin dihambat oleh persepsi yang selektif dan ketidakmauan para pelaksana untuk mengetahui persyaratan-persyaratan suatu kebijakan.

- b. Kejelasan, faktor kedua yang dikemukakan Edwards adalah kejelasan. Jika kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Ketidakjelasan pesan komunikasi yang disampaikan berkenaan dengan implementasi kebijakan akan mendorong terjadinya interpretasi yang salah bahkan mungkin bertentangan dengan makna pesan awal. Edwards mengidentifikasikan enam faktor yang mendorong terjadinya ketidakjelasan komunikasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut adalah kompleksitas kebijakan

publik, keinginan untuk tidak mengganggu kelompok-kelompok masyarakat, kurangnya konsensus mengenai tujuan-tujuan kebijakan, masalah-masalah dalam memulai suatu kebijakan baru, menghindari pertanggungjawaban kebijakan, dan sifat pembentukan kebijakan pengadilan.

- c. Konsistensi, faktor ketiga yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah konsistensi. Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas, walaupun perintah yang disampaikan kepada para pelaksana kebijakan mempunyai unsur kejelasan, tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik.

Menurut Edward, dengan menyelidiki hubungan antara komunikasi dan implementasi, maka kita dapat mengambil generalisasi yakni bahwa semakin cermat keputusan-keputusan dan perintah-perintah pelaksanaan diteruskan kepada mereka yang harus melaksanakannya, maka semakin tinggi probabilitas keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah pelaksanaan tersebut dilaksanakan. Dalam situasi seperti ini, penyimpangan transmisi merupakan sebab utama bagi kegagalan implementasi. Adapun penjelasan mengenai bagaimana komunikasi implementasi yang tidak konsisten sama seperti penjelasan bagi kurangnya kejelasan pesan komunikasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat konsistensi keputusan menyangkut kerumitan kebijakan publik, masalah-masalah yang mengawali program baru dan akibat banyaknya ketidakjelasan tujuan.

2. Sumber Daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yaitu kompetensi implementor, dan sumber daya finansial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif, tanpa sumber daya kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja. Dalam Winarno (2012:184) sumber- sumber yang penting meliputi : staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan.

Sumber yang paling penting dalam melaksanakan kebijakan adalah staf. ada satu hal yang harus diingat adalah bahwa jumlah tidak selalu mempunyai efek positif bagi implementasi kebijakan. Hal ini berarti bahwa jumlah staf yang banyak tidak secara otomatis mendorong implementasi yang berhasil, dan kurangnya kecakapan yang dimiliki oleh para pegawai pemerintah ataupun staf. Namun di sisi yang lain kekurangan staf juga akan menimbulkan persoalan yang pelik menyangkut implementasi kebijakan yang efektif.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang

diinginkan oleh para pembuat keputusan awal, demikian pula sebaliknya bila tingkah laku atau perspektif para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah prosedur operasi yang standar (*standar operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Dalam Winarno (2012:207) struktur organisasi-organisasi yang melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh penting pada implementasi. Salah satu dari aspek-aspek struktural paling dasar dari suatu organisasi adalah prosedur-prosedur kerja ukuran dasarnya (*Standard Operating Procedures*, SOP) dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia. Selain itu, SOP juga menyeragamkan tindakan-tindakan dari para pejabat dalam organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas, yang pada gilirannya dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar (orang dapat dipindahkan dengan mudah dari suatu tempat ke tempat lain) kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan-peraturan.

B. Model Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Van Meter dan Van Horn dalam Mulyadi (2016:72) menjelaskan ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi yaitu:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan, harus jelas terukur sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang dapat menyebabkan terjadinya konflik diantara para agen implementasi.
2. Sumber Daya, dimana kebijakan perlu didukung oleh sumber daya baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.
3. Komunikasi antar organisasi dan Penguatan aktivitas, implementasi sebuah program terkadang perlu di dukung dan di koordinasikan dengan instansi lain agar tercapai keberhasilan yang diinginkan.
4. Karakteristik agen pelaksana, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan termasuk didalamnya karakteristik para partisipan yakni mendukung atau menolak, bagaimana juga sikap opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan tersebut.
5. Kondisi sosial, ekonomi dan politik, mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.
6. Disposisi implementor, mencakup tiga hal penting yaitu: respon implementor terhadap kebijakan, kognisi, dan intensitas.

2.1.3. Pengertian Sistem Informasi Manajemen

Sistem informasi Manajemen adalah sebuah sistem yang terpadu untuk menyajikan informasi yang berfungsi sebagai operasi organisasi, manajemen, dan proses pengambilan keputusan di dalam suatu organisasi. Sistem informasi manajemen juga merupakan sistem yang di pakai oleh organisasi baik organisasi instansi pemerintah maupun swasta untuk melakukan pengelolaan data serta informasi yang berkaitan dengan fungsi manajemen yang lebih efektif.

Menurut Davis dalam Rochaety (2017:10) sistem informasi manajemen merupakan sebuah sistem manusia dan mesin yang terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen dan proses pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Murdick dalam Rochaety (2017:10) sistem informasi manajemen adalah proses komunikasi dimana *input* direkam, disimpan, dan diambil kembali untuk menyajikan keputusan yang berbentuk *output* mengenai perencanaan, pengoprasian dan pengendalian.

Berdasarkan pada pengertian-pengertian diatas maka tujuan dibentuknya sistem informasi manajemen atau SIM agar organisasi memiliki informasi yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan manajemen, baik yang menyangkut keputusan-keputusan rutin maupun keputusan-keputusan yang strategis dalam pelaksanaan tugas organisasi. Rochaety (2017:15) SIM berdasarkan fungsi organisasi dapat dianggap sebagai suatu federasi subsistem yang didasarkan atas fungsi yang dilaksanakan dalam suatu organisasi. Masing-masing subsistem membutuhkan aplikasi-aplikasi untuk membentuk semua proses informasi yang berhubungan dengan fungsinya, walaupun akan menyangkut database, model base dan beberapa program komputer yang biasa untuk setiap subsistem fungsional. Dalam masing-masing subsistem fungsional, terdapat aplikasi untuk proses transaksi, pengendalian operasional, pengendalian manajemen, dan perencanaan strategis.

2.1.4. Sistem Informasi Manajemen Keuangan

Aplikasi sistem informasi manajemen keuangan digunakan untuk membantu proses pengolahan data keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan sistem pencatatan yang disebut akuntansi. Akuntansi

menyajikan laporan keuangan yang dibutuhkan oleh manajer keuangan dalam bentuk neraca, laporan laba rugi serta laporan perubahan modal, oleh karena itu sistem informasi manajemen keuangan kerap disebut dengan sistem informasi akuntansi (SIA). Rochaety (2017:123) Akuntansi merupakan proses pencatatan, penggolongan, peringkasan peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian yang bersifat keuangan, yang menyajikan seluruh laporan keuangan sebuah organisasi termasuk perusahaan yang berperan untuk mengetahui gambaran posisi keuangan atau pembiayaan pada organisasi tersebut.

2.1.5. Pengertian Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)

Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan dikenal dengan aplikasi SIMDA, merupakan salah satu produk dari teknologi sistem informasi yang digunakan oleh banyak Pemerintah daerah di Indonesia dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerahnya. Untuk menghasilkan laporan keuangan tersebut diperlukan suatu sistem yang dapat diandalkan (*reliable*), yaitu sistem yang mampu mengolah data-data (*input*) dan menghasilkan informasi (*output*) yang dapat digunakan oleh manajemen dalam pengambilan keputusan.

Budiman dan Fefri (2013:87-110), mengungkapkan bahwa aplikasi SIMDA merupakan aplikasi database yang bertujuan untuk mempermudah pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Aplikasi SIMDA dikembangkan dengan memperhatikan dan mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Oleh sebab itu pengendalian terhadap aplikasi menjadi suatu keharusan untuk menjadi

pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan Aplikasi SIMDA untuk menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

2.1.6. Unsur SIMDA

Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tahun 2008 kerangka arsitektur Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) terdiri dari empat lapis struktur, yaitu :

1. Akses, jaringan telekomunikasi, jaringan internet, dan media komunikasi lainnya yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengakses situs pelayanan publik.
2. Portal, pelayanan publik, situs web pemerintah pada internet penyedia layanan publik tertentu yang mengintegrasikan proses pengolahan dan pengelolaan informasi dan dokumen elektronik di sejumlah instansi yang terkait.
3. Organisasi pengolahan dan pengelolaan informasi organisasi pendukung yang mengelola, menyediakan dan mengolah transaksi informasi dan dokumen elektronik, dan
4. Infrastruktur dan aplikasi dasar semua prasarana, baik berbentuk perangkat keras dan lunak yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan, pengolahan, transaksi, dan penyaluran informasi.

2.1.7. Tujuan SIMDA

Tujuan pengembangan program SIMDA yaitu :

1. Membantu pemerintah daerah untuk membangun dan menggunakan sistem informasi keuangan dan kinerja untuk tata kelola yang baik termasuk pengendalian transaksi dan informasi yang memadai.

2. Aplikasi SIMDA dikembangkan bersifat generik/ berbagai pakai atau dapat digunakan seluruh pemda sehingga pemda tidak perlu mengembangkan aplikasi serupa dengan sumber daya yang relatif tinggi.
3. Menyediakan *database* mengenai kondisi di daerah yang terpadu baik dari aspek keuangan, aset daerah, kinerja daerah, kepegawaian/aparatur daerah maupun pelayanan publik yang dapat digunakan untuk penilaian kinerja instansi pemerintah daerah.
4. Menghasilkan informasi yang komprehensif, tepat dan akurat kepada manajemen pemerintah daerah. Informasi ini dapat digunakan sebagai bahan untuk mengambil keputusan seluruh pemangku kepentingan.
5. Mempersiapkan aparat daerah untuk mencapai tingkat penguasaan dan pendayagunaan teknologi informasi yang lebih baik.
6. Memperkuat basis pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.

2.1.8. Aplikasi SIMDA Keuangan

Program aplikasi Komputer SIMDA keuangan adalah suatu program aplikasi yang ditunjukan untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Dengan aplikasi ini, pemerintah daerah dapat melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara integrasi, dimulai dari penganggaran, penatausahaan hingga akuntansi dan pelaporannya.

Aplikasi SIMDA keuangan versi 2.7 merupakan modifikasi dari aplikasi SIMDA Versi 2.1 dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan penerapan basis akrual sesuai PP No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan sebagai pengganti PP No. 24 Tahun 2005, dan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan

berbasis akrual pada pemerintah daerah. Aplikasi ini sangat diharapkan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara efisien, efektif sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan dan menyajikan laporan keuangan berbasis akrual dengan wajar mengingat banyaknya peraturan Perundang-Undangan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pengembangan sistem SIMDA keuangan dilakukan penyempurnaan dari beberapa versi-versi dengan tujuan untuk memperbaiki ketidakstabilan sistem yang lama, dan karena adanya perubahan kebijakan dengan aturan perundang-undangan.

Manfaat SIMDA Keuangan diantaranya adalah :

1. Sesuai Peraturan Perundang-Undangan

Aplikasi SIMDA Keuangan di *design* berdasarkan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Terintegrasi dan berbagi data

Aplikasi SIMDA dapat di implementasikan untuk pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, memanfaatkan teknologi informasi dari perencanaan, penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawaban keuangan baik dilaksanakan di SKPKD maupun di SKPD sehingga mempunyai keuntungan :

- a. Pengendalian transaksi terjamin
- b. Efisien dalam melakukan penatausahaan, hanya membutuhkan satu kali input data transaksi sehingga menghemat waktu, tenaga dan biaya.
- c. Cepat, akurat dan efisien dalam menghasilkan informasi keuangan.

Saat ini, Aplikasi SIMDA telah memenuhi *interoperability* melalui integrasi dengan berbagai *stakeholder* dalam rangka menyediakan data dan berbagi pakai dengan aplikasi dari instansi lain seperti DJPK, Perbankan, PT Taspen, BPK RI, LKPP, dan instansi lainnya.

3. *Transfer of Knowledge*

Dengan memiliki sumber daya manusia yang kompeten dalam hal :

- a. Penguasaan disiplin ilmu akuntansi dan audit.
- b. Penguasaan *business process* pengelolaan keuangan daerah, dan
- c. Pengalaman praktis pengelolaan keuangan daerah.

Serta didukung dengan kantor perwakilan BPKP yang dapat menjangkau seluruh pemerintah daerah, maka BPKP dapat membimbing dan mengasistensi pengelola keuangan daerah untuk mengimplementasi sistem pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan dan kebutuhan manajemen dengan menggunakan aplikasi SIMDA. Bimbingan dan asistensi tersebut merupakan proses *transfer of knowledge* dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kapasitas SDM Pemerintah Daerah.

4. Kesenambungan Pemeliharaan

Dengan komitmen dan dukungan dari pimpinan dan eksistensi BPKP maka pengembangan dan perbaikan aplikasi SIMDA masih terus dilakukan meliputi :

- a. Penyempurnaan dan perbaikan aplikasi SIMDA mengikuti praktik pengelolaan keuangan terbaik.
- b. Penyesuaian dengan peraturan yang terbit kemudian.

- c. Pemeliharaan dan asistensi kepada pemerintah daerah yang mengimplementasikan.

5. Mudah digunakan

Fitur-fitur sederhana, mudah dimengerti dan dipelajari, dengan melakukan transaksi keuangan pemerintah daerah sehari-hari menggunakan aplikasi ini (*output* dokumen transaksi seperti SPD, SPP, SPM dan SP2D) secara otomatis catatan dan laporan keuangan dapat dihasilkan (*output*) catatan akuntansi seperti buku jurnal, buku besar, dan laporan.

6. Pengawasan berkelanjutan

Informasi yang dihasilkan dari aplikasi SIMDA dimanfaatkan untuk mengimplementasikan *Governance, Risk, dan Compliance* (Tata kelola, resiko, dan kepatuhan) melalui pengembangan aplikasi pengawasan berbasis aplikasi SIMDA untuk meningkatkan pengawasan berkelanjutan baik untuk pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

2.2. Penelitian Terdahulu

a. Penelitian Ferialien Sembel, Johnny Posumah, dan Very Londa (2019)

Dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah suatu studi di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud” adapun hasil penelitiannya adalah Kebijakan SIMDA di BPKAD Kabupaten Kepulauan Talaud telah diterapkan sejak tahun 2007. Namun implementasi kebijakan ini masih belum berjalan dengan baik, dan masih terdapat kendala dalam implementasi tersebut, seperti seringnya terjadi gangguan / kerusakan jaringan sistem aplikasi, sarana dan prasarana pendukung seperti komputer masih kurang memadai

keterbatasan kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki, dan penempatan karyawan yang belum sesuai dengan kompetensi dan kemampuannya. Kesimpulan dari hasil penelitian yaitu komunikasi pada implementasi kebijakan SIMDA di BPKAD Kabupaten Kepulauan Talaud sudah dilaksanakan. Sebelum kebijakan ini diterapkan dilakukan sosialisasi kegiatan di setiap pertemuan, jumlah sumber daya yang dimiliki sudah mencukupi tetapi dalam penempatannya tidak sesuai dengan kemampuan, serta sarana dan prasarana yang belum memadai. Sikap, integritas, profesional, komitmen, ketulusan, serta sinergi antara pimpinan dan pegawai dalam menjalankan tugasnya pada implementasi SIMDA di BPKAD Kabupaten Kepulauan Talaud sangat baik. Struktur birokrasi mengacu pada standar operasional prosedur yang ada serta pembagian tugas dan tanggung jawab pada masing-masing bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Keterkaitan antara penelitian ini dengan penelitian Ferialien Sembel, Johnny Posumah, dan Very Londa adalah fokus penelitian yang membahas mengenai Kebijakan SIMDA Keuangan, metode penelitian yang digunakan serta persamaan teori implementasi yang digunakan yaitu model George C. Edward III meliputi (komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi). Teknik pengumpulan data (wawancara, observasi/pengamatan, dan studi dokumentasi) serta teknik analisis data (reduksi data, penyajian data, penyimpulan dan verifikasi, kesimpulan akhir). Sedangkan hal yang membuat penelitian ini dikatakan berbeda pada tempat (*locus*) penelitian.

b. Penelitian Nova Roslina Firdaus (2017)

Dalam penelitiannya yang berjudul “Kajian Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dalam upaya meningkatkan kualitas

laporan keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat” adapun hasil penelitiannya adalah Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) merupakan program aplikasi keuangan daerah yang telah mengintegrasikan empat tahapan penyelenggaraan keuangan daerah yaitu, penganggaran, perubahan anggaran, penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban. Program aplikasi SIMDA yang digunakan adalah program aplikasi SIMDA keuangan versi 2.7

SIMDA juga mengintegrasikan antara proses transaksi keuangan yang terjadi dengan proses penjurnalannya secara otomatis, sehingga setiap transaksi keuangan yang terjadi dapat langsung dilihat jurnal atas transaksi tersebut hingga pelaporannya pada waktu yang bersamaan. Dari hasil deskripsi dan kajian mengenai implementasi SIMDA dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) di Kabupaten Bandung Barat diperoleh hasil pegawai sudah memahami sasaran dan tujuan dari SIMDA secara umum, penggunaan SIMDA ini telah memiliki akses, jaringan telekomunikasi, jaringan internet dan media komunikasi. Portal, pelayanan publik, situs web pemerintah, organisasi pengolahan dan pengelolaan informasi organisasi pendukung, dan infrastruktur aplikasi dasar semua prasarana, kualitas laporan keuangan daerah yang dihasilkan sudah memenuhi persyaratan relevan, andal, dapat dibandingkan dan dipahami. Implementasi SIMDA dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat terlaksana karena adanya komunikasi aktif, sumber daya manusia, pelaksanaan program-program pelatihan rutin, adanya kesadaran para pegawai untuk meningkatkan kemampuan

mereka dengan curah pikir atau diskusi, adanya sikap implementor yang setuju atas pelaksanaan penerapan SIMDA serta dukungan dari kepala dinas/pemimpin, struktur birokrasi yang berperan dalam pengawasan atas jalannya sistem aplikasi komputerisasi SIMDA.

Keterkaitan antara penelitian ini dengan penelitian Nova Roslina Firdaus yaitu membahas mengenai implementasi SIMDA keuangan versi 2.7 serta persamaan teori implementasi yang digunakan yaitu George C. Edwards III dan jenis penelitian yang digunakan. Sedangkan perbedaannya terletak pada tempat (*locus*) penelitian.

c. Penelitian Novlentina Pasi, Abdul Kadir, Isnaini (2017)

Dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Keuangan berbasis AkruaI pada Pemerintah Kabupaten Dairi”. Adapun hasil dari penelitian yang bertujuan untuk mengetahui gambaran pelaksanaan SIMDA keuangan versi 2.7 berbasis akruaI pada pemerintah Kabupaten Dairi serta produk yang dihasilkan SIMDA keuangan versi 2.7 berbasis akruaI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan SIMDA keuangan versi 2.7 berbasis akruaI sudah terlaksana melalui faktor komunikasi, dan disposisi. Adapun permasalahan adalah dari faktor sumber daya dan struktur birokrasi. Penganggaran dan penatausahaan dilaksanakan berdasarkan peraturan Menteri dalam negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Sementara penatausahaan berdasarkan peraturan Menteri dalam negeri nomor 64 tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akruaI.

Keterkaitan antara penelitian ini dengan penelitian Novlentina Pasi, Abdul Kadir, dan Isnaini yaitu membahas mengenai implementasi SIMDA keuangan berbasis akrual atau SIMDA keuangan versi 2.7 berbasis akrual serta persamaan teori yang digunakan yaitu George C. Edwards III yang mengatakan 4 faktor (komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi), jenis penelitian serta Teknik pengumpulan data yang digunakan, sedangkan hal yang membuat penelitian ini dikatakan berbeda yaitu pada tempat (*locus*) penelitian.

d. Penelitian Kurnia Hardjanto, Margaretha Kusuma P dan Murjoko (2019)

Dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan berbasis akrual pada Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang”. Adapun hasil dari penelitiannya adalah secara teknis aplikasi SIMDA keuangan tidak membutuhkan spesifikasi komputer yang tinggi, sehingga tidak diperlukannya biaya pengadaan hardware secara khusus. Untuk infrastruktur jaringan membutuhkan jaringan yang kuat dan stabil, jaringan yang digunakan intranet LAN atau untuk yang diluar jangkauan dengan diberikan IP khusus. Hal ini menjadi kelemahan apabila jaringan mengalami *trouble* yang mengakibatkan tidak bisa menginput data. selain itu, penggunaan banyak sering mengakibatkan *overload* dan akses SIMDA menjadi lambat. Pada saat ada permintaan data keuangan diluar format baku, masih membutuhkan format manual misalnya menginput dengan *Excel*. Penerapan SIMDA keuangan digunakan dalam perencanaan dan pelaporan kegiatan organisasi perangkat daerah (OPD). Berdasarkan Pemendagri No. 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yang mencakup kegiatan penganggaran, penatausahaan keuangan (prosedur tata usaha keuangan penerimaan/pengeluaran kas) dan

pelaporan atau prosedur akuntansi. Sementara itu pada OPD Dinas pertanian dan pangan kota Magelang sesuai prosedur yang dicakup oleh aplikasi SIMDA keuangan meliputi : prosedur anggaran (RKA,DPA), prosedur pada PPK OPD (verifikasi, perbendaharaan, dan akuntansi) prosedur bendahara pengeluaran, dan prosedur bendahara penerimaan. Aplikasi SIMDA keuangan berbasis akrual di Dinas pertanian dan pangan lebih berkualitas untuk mempengaruhi pengambilan keputusan manajemen dibandingkan aplikasi sebelumnya. Karena aplikasi tersebut mampu menghasilkan laporan keuangan dan segala bukti pendukung yang lebih lengkap, cepat dan sesuai dengan kebutuhan untuk memantau posisi keuangan dan kinerja yang telah dicapai oleh Dinas. Perencanaan anggaran dapat dilakukan tepat waktu sesuai dengan waktu yang ditentukan. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode pre dan post test, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIMDA Keuangan berbasis akrual meningkatkan kualitas informasi dibandingkan dengan aplikasi sebelumnya.

Keterkaitan antara penelitian ini dengan penelitian Kurnia Hardjanto, Margaretha Kusuma P dan Murjoko yaitu membahas Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan berbasis akrual. Sedangkan perbedaannya terletak pada jenis penelitian, metode penelitian (survey dengan responden mengisi koesioner penelitian) dan tempat (*locus*) penelitian.

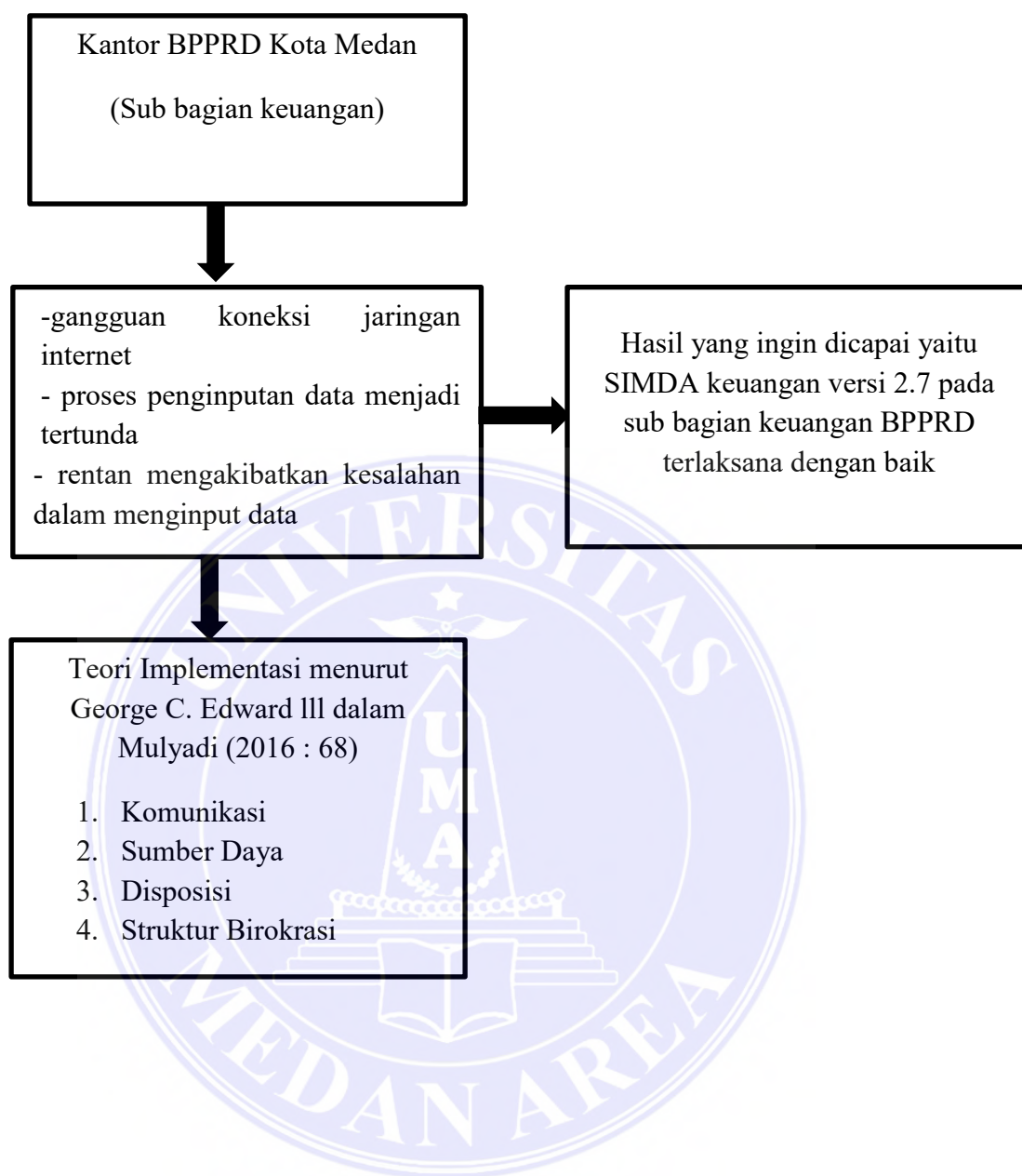
2.3. Kerangka Pemikiran

Menurut Uma Sekaran dalam Pasolong (2016:83) kerangka berfikir merupakan modal konseptual tentang bagaimana teori yang berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang urgen. Pada

dasarnya kerangka berfikir adalah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan penelitian.

Kerangka pemikiran merupakan alur pemikiran dari penulis sendiri atau juga mengambil dari suatu teori yang dianggap relevan dalam upaya menjawab masalah-masalah yang ada dirumusan masalah penelitian. Dalam penelitian ini penulis meneliti mengenai implementasi sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) keuangan pada BPPRD kota Medan, khususnya pada sub bagian keuangan. Adapun permasalahan yang diamati peneliti yaitu gangguan koneksi jaringan internet pada saat penginputan data. Peneliti menggunakan teori implementasi menurut George C. Edward III, karena menurut saya teori mudah dipahami dan lebih tepat untuk mengukur keberhasilan sebuah program yang merujuk pada empat variabel yaitu (sumber daya, komunikasi, disposisi dan struktur birokrasi) yang berperan penting dalam implementasi SIMDA keuangan versi 2.7 di BPPRD kota Medan.

Dari analisis yang dijelaskan penulis maka yang menjadi kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan peneliti merupakan metode penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang memerlukan pemahaman secara mendalam dan menyeluruh yang berhubungan dengan objek yang diteliti dan mengumpulkan data dan fakta sebanyak-banyaknya. Metode yang digunakan peneliti dapat mendeskripsikan dan menganalisis suatu kejadian atau peristiwa sesuai dengan masalah yang diangkat oleh penulis dengan judul Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) keuangan pada Sub bagian keuangan BPPRD kota Medan.

Menurut Sujarweni (2014:5) penelitian merupakan salah satu hal yang penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan, sekaligus sebagai bagian yang penting dalam perkembangan peradaban manusia. Metode penelitian adalah cara ilmiah (rasional, empiris dan sistematis) yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu untuk melakukan penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan deskriptif yaitu penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2014:11) penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk mengetahui nilai variabel/mandiri, baik satu variabel atau lebih (*indepeden*) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain. Menurut Strauss dan Corbin dalam Sujarweni (2014:6) penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat

dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).

Menurut Flick dalam Gunawan (2015:81) ialah *Specific relevance to the study of social relations, owing to the fact of the pluralization of life worlds*. Penelitian kualitatif adalah keterkaitan spesifik pada studi hubungan sosial yang berhubungan dengan fakta dari Pluralisasi dunia kehidupan. Lebih lanjut menurut Bogdan & Taylor dalam Gunawan (2015:82) penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan berperilaku yang dapat diamati yang diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh).

Selanjutnya menurut Sugiyono (2015:15) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Pada penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana implementasi SIMDA keuangan versi 2.7 dan bagaimana kendala dalam implementasi SIMDA keuangan versi 2.7 pada BPPRD kota Medan, dengan menggunakan jenis metode penelitian kualitatif.

3.2. Lokasi dan waktu Penelitian

Lokasi yang menjadi tempat penelitian penulis untuk mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan yaitu di sub bagian keuangan pada BPPRD Kota Medan yang beralamat di Jl. Jendral Besar H. Abdul Haris Nasution No. 32, Medan, Sumatera Utara. Alasan pemilihan lokasi penelitian, karena peneliti merasa tertarik meneliti bagaimana Implementasi SIMDA Keuangan Versi 2.7 dimana setelah peneliti melakukan pra-penelitian adanya fenomena permasalahan seperti gangguan koneksi jaringan internet pada saat menginput data. Peneliti

melakukan penelitian dari bulan Februari 2021 - Maret 2021. Adapun tahap-tahap perincian kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dipaparkan dalam tabel berikut ini :

No	Uraian Kegiatan	Sept 2020	Okt 2020	Nov 2020	Des 2020	Jan 2021	Feb 2021	Mar 2021	Apr 2021	Mei 2021	Juni 2021
1	Tahap persiapan kegiatan										
	Pengajuan Judul										
	Penyusunan Proposal										
	Seminar Proposal										
	Perbaikan Proposal										
2	Tahap Pelaksanaan Penelitian										
	Pengumpulan Data										
	Analisis Data										
	Perumusan Hasil Penelitian										
	Seminar Hasil										
3	Tahap Penyelesaian										
	Revisi Skripsi										
	Sidang Meja Hijau										
	Penyelesaian Skripsi										

3.3. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian memiliki peran yang sangat penting dalam pengambilan data dan informasi. Menurut Afrizal (2016:139) informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam. Dalam penelitian kualitatif, informan dibagi menjadi tiga yaitu :

a. Informan Kunci

Menurut Afrizal (2016:139) informan kunci adalah informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat peneliti. Dalam penelitian ini yang menjadi informan kunci yaitu Ibu Dra. Fitriati Hasibuan, MM selaku Kepala Sub Bagian Keuangan BPPRD Kota Medan.

b. Informan Utama

Menurut Afrizal (2016:139) informan utama adalah orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan dipelajari. Informan utama dalam penelitian tersebut yaitu 3 (tiga) staf pegawai administrasi keuangan yaitu Bapak Alfa Rheza Daulay S.E, M.Si, Bapak M. Lutfi S.E, dan Ibu Maslina Fitriyanti Siregar, S.E.

c. Informan tambahan

Menurut Afrizal (2016:139) informan tambahan merupakan orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan pada penelitian kualitatif. Informan tambahan dalam penelitian ini yaitu staf pegawai keuangan (Non PNS) yaitu Bapak Fauzan Shaufi S.H dan Bapak Andy S.E.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2015:308) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), *interview* (wawancara) dan dokumentasi.

a. Observasi (pengamatan)

Menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2015 : 203) observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dapat disimpulkan bahwa observasi adalah proses pengamatan secara langsung yang dilakukan oleh peneliti terhadap objek yang diteliti dengan menggunakan pencatatan yang sistematis. Observasi yang dilakukan yaitu mengamati kegiatan sub bagian keuangan di kantor BPPRD kota Medan dalam proses administrasi keuangan dengan menggunakan aplikasi SIMDA keuangan versi 2.7 serta ingin mengetahui apa yang menjadi kendala dalam implementasi SIMDA keuangan versi 2.7.

b. Interview (wawancara)

Menurut Esterbrg dalam Sugiyono (2015:317) wawancara didefinisikan sebagai berikut “ *a meeting of two persons to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic*”. Artinya wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di konstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Menurut Susan Stainback dalam Sugiyono (2015:318), mengemukakan bahwa dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui obsevasi. Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi yang kompleks berisi pendapat, sikap, dan pengalaman pribadi mengenai

implementasi sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) keuangan versi 2.7 dan kendala dalam implementasi tersebut pada BPPRD Kota Medan.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2015:329) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumentasi yang digunakan peneliti dalam penelitian implementasi sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) keuangan versi 2.7 dan kendala dalam implementasi tersebut pada BPPRD kota Medan seperti foto, gambar serta data-data yang diperlukan peneliti.

3.5. Metode Analisis Data

Menurut Sugiyono (2015:336) mengemukakan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam penelitian implementasi sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) keuangan versi 2.7 dan kendala dalam implementasi tersebut pada BPPRD kota Medan, analisis data yang dilakukan peneliti lebih di fokuskan selama proses dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data.

Pada penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah model *Miles dan Huberman* (2012:255) meliputi :

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan upaya untuk mengumpulkan data dengan berbagai macam seperti : observasi, wawancara, dokumentasi dan sebagainya dalam penelitian implementasi SIMDA keuangan versi 2.7 dan kendala implementasi tersebut pada BPPRD kota Medan.

b. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemulihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan selama meneliti untuk memilih informasi yang mana dianggap yang menjadi pusat penelitian lapangan, dalam penelitian implementasi SIMDA keuangan versi 2.7 dan kendala dalam implementasi tersebut pada BPPRD kota Medan.

c. Penyajian Data

Penyajian data yaitu sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan atau pengambilan tindakan. Pengambilan data ini membantu penulis memahami peristiwa yang terjadi dan mengarah pada analisa dan tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman. Alasan dasar dilakukan pada tahapan ini adalah menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam suatu bentuk yang disederhanakan dan mudah dipahami, dalam penelitian implementasi SIMDA keuangan versi 2.7 dan kendala dalam implementasi tersebut pada BPPRD kota Medan.

d. Kesimpulan Data

Dalam pengambilan keputusan atau verifikasi membuat kesimpulan sementara dari semula belum jelas menjadi lebih terperinci dengan cara di verifikasi dalam arti meninjau catatan-catatan dengan maksud data yang diperoleh tidak valid untuk memperoleh jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian. Sesuai rumusan masalah penulis yaitu bagaimana implementasi SIMDA keuangan versi 2.7 BPPRD Kota Medan dan kendala yang dihadapi dalam implementasi tersebut.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

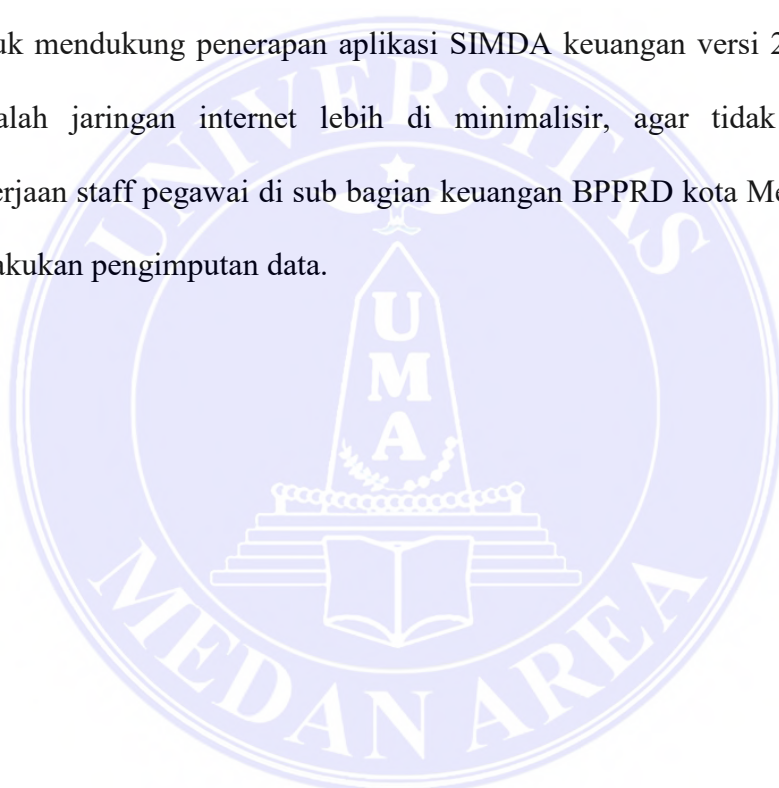
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penulis setelah melakukan penelitian pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan mengenai implementasi SIMDA keuangan versi 2.7 maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Implementasi SIMDA keuangan versi 2.7 di sub bagian keuangan BPPRD kota Medan sudah diterapkan sejak tahun 2016. komunikasi yang dilakukan sudah sangat efektif, hal ini terlihat jelas dari transmisi, kejelasan dan konsistensi informasi yang disampaikan. Sumber daya yang mencakup sumber daya manusia, sumber dana dan fasilitas juga sudah memadai. Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan implementasi SIMDA keuangan versi 2.7 sudah baik, mereka mampu menjalankan kebijakan tersebut. Struktur Birokrasi yang berkaitan pada standar operasional prosedur (SOP) yang ada sudah dilaksanakan dengan baik, hal ini terlihat pada pembagian tugas masing-masing staff pegawai keuangan.
2. Kendala pada implementasi SIMDA keuangan versi 2.7 yaitu masalah pada gangguan jaringan internet, sehingga mengganggu pekerjaan pada saat melakukan pengimputan data. Jika gangguan jaringan internet terjadi pihak sub bagian keuangan BPPRD kota Medan menghubungi Dinas Kominfo selaku penyelenggara jaringan.

5.2. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi SIMDA keuangan versi 2.7 di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) kota Medan penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Perlunya pengembangan dan pelatihan kembali mengenai SIMDA keuangan versi 2.7 kepada para pegawai yang ada di sub bagian keuangan BPPRD kota Medan.
2. Untuk mendukung penerapan aplikasi SIMDA keuangan versi 2.7 diharapkan masalah jaringan internet lebih di minimalisir, agar tidak mengganggu pekerjaan staff pegawai di sub bagian keuangan BPPRD kota Medan pada saat melakukan pengimputan data.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afrizal. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Gunawan, Imam. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif :Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Huberman, Miles B. 2012. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : UI Press.
- Irfan, H. Rusdiana. 2014. *Sistem Informasi Manajemen*. Bandung: Pustaka Setia.
- Kadir, Abdul. 2020. *Fenomena Administrasi Publik Dalam Perspektif Administrasi Publik Di Indonesia*. CV. Dharma Persada.
- Muda, Indra. 2019. *Transparansi Implementasi Kebijakan Publik*. Medan: Media Persada.
- Mulyadi, Deddy. 2016. *Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta..
- Pasolong, Harbani. 2016. *Metode Penelitian Administrasi Pubik*. Bandung: Alfabeta.
- Rochaety, Eti. 2017. *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- , 2015. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sujarweni, V. Wiratna. 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Wahab, Solichin Abdul. 2014. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS

Jurnal

- Budiman, Fuad dan Indra, Fefri. (2013), *Pendekatan Technology Acceptance Model Dalam Kesuksesan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah*. Jurnal WRA, 1(1): 87-110

Pasi, Novlentina, Abdul Kadir, dan Isnaini. (2017). *Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Keuangan berbasis AkruaI pada Pemerintah Kabupaten Dairi*. Jurnal Administrasi Publik, 7(1): 49-63

Hardjanto, Kurnia, Margaretha Kusuma P, dan Murjoko. (2019). *Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan berbasis akrual pada Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang*. Jurnal Teknik Informatika, 2 (1): 11-20

Sembel, Feralin, Johnny Posumah, dan Very Londa. 2019. *Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah suatu studi di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud*. Jurnal Administrasi Publik. Universitas Sam Ratulangi. 5(67): 37-47

Tesis

Firdaus, Nova Roslina. (2016). *Kajian Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Di Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat*. (Tesis, Universitas Pasundan).

Perundang-Undangan

Keputusan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 tahun 2003 tentang pedoman umum perkantoran Elektronik lingkup internet di lingkungan instansi pemerintah.

Permendagri nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2008 tentang pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengembangan SIMDA.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan (SAP).

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi berbasis AkruaI.

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Peraturan Daerah (PERDA) No. 16 Tahun 1991 tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan

Peraturan Walikota Medan Nomor 27 Tahun 2017 pasal 2 tentang susunan organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan

Berdasarkan Peraturan Walikota Medan Nomor 27 Tahun 2017 pasal 9 tentang rincian tugas dan fungsi Sub bagian keuangan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan

Internet

<http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/333/versi-2.1.bpkp>

(diakses pada tanggal 09 Oktober 2020).

https://www.academia.edu/31555041/Modul_Pelatihan_Simda_Keuangan_V_2_7

(diakses pada tanggal 24 Oktober 2020).

<http://dewantik.sragenkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/indikator-29-simda.pdf> (diakses pada tanggal 22 Januari 2021)



LAMPIRAN

Lampiran 1 : Dokumentasi Penelitian



Gambar 1 : Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan
(Sumber : Dokumen Pribadi, Rabu, 24 Februari 2021)



Gambar 2 : Foto peneliti setelah wawancara dengan informan kunci yaitu Ibu Dra. Fitriaty Hasibuan M.M selaku Kepala Sub bagian Keuangan (Kasubbag) BPPRD Kota Medan
(Sumber : Dokumen Pribadi, Selasa, 23 february 2021 pukul 10.00 WIB).



Gambar 3 : Foto peneliti setelah wawancara dengan informan utama yaitu Bapak M. Lutfi, S.E sebagai staf pegawai keuangan BPPRD Kota Medan
(Sumber : Dokumen Pribadi, Selasa, 23 februari 2021 pukul 14.00 WIB)



Gambar 4 : Foto peneliti pada saat wawancara dengan informan utama yaitu Bapak Alfa Rheza Daulay, S.E, M.Si sebagai staf pegawai keuangan BPPRD kota Medan
(Sumber : Dokumen Pribadi, Senin, 22 februari 2021 pukul 14.30 WIB).



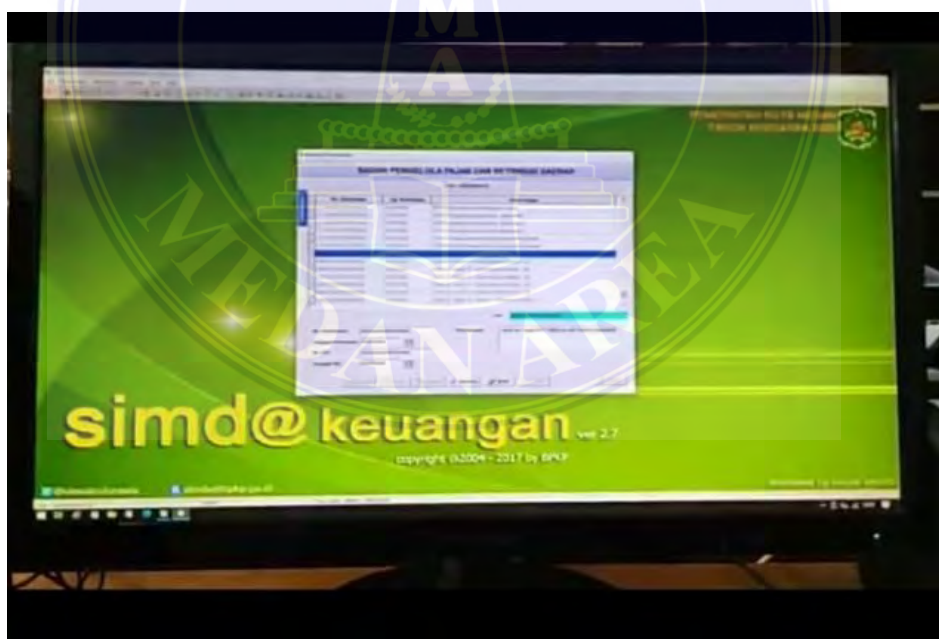
Gambar 5 : Foto peneliti setelah wawancara dengan informan utama yaitu Ibu Maslina Fitrianty Silegar, S.E sebagai staf pegawai keuangan BPPRD Kota Medan
(Sumber : Dokumen Pribadi, Selasa, 23 februari 2021 pukul 10.30 WIB).



Gambar 6 : Foto peneliti setelah wawancara dengan informan tambahan yaitu Bapak Andy, S.E sebagai staf pegawai keuangan (Non PNS) BPPRD Kota Medan
(Sumber : Dokumen Pribadi, Rabu, 24 februari 2021 pukul 11.00 WIB).



Gambar 7 : Dokumentasi peneliti setelah wawancara dengan informan tambahan yaitu Bapak Fauzan Shaufi, S.H sebagai staf pegawai (Non PNS) BPPRD Kota Medan
(Sumber : Dokumen Pribadi, Rabu, 24 februari 2021 pukul 11.30 WIB).



Gambar 8 : Tampilan aplikasi SIMDA keuangan versi 2.7 pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) kota Medan
(Sumber : Dokumen Pribadi, Senin, 22 februari 2021 pukul 15.00 WIB)

Lampiran 2 : Data Informan

1. Informan Kunci

- Nama : Dra. Fitriaty Hasibuan M.M
Jenis kelamin : Perempuan
Usia : 52 Tahun
Pendidikan : S2 SDM (Sumber Daya Manusia)
Jabatan : Kepala Sub bagian Keuangan / (Kasubbag) Keuangan
BPPRD Kota Medan.

2. Informan Utama

- Nama : M. Lutfi, S.E
Jenis kelamin : Laki-laki
Usia : 39 Tahun
Pendidikan : S1 Manajemen
Jabatan : Staf Sub bagian keuangan BPPRD kota Medan.
- Nama : Alfa Rheza Daulay, S.E, M.Si
Jenis kelamin : Laki-laki
Usia : 38 Tahun
Pendidikan : S1 Akuntansi / S2 PWD (perencana wilayah daerah)
Jabatan : Staf Sub bagian keuangan BPPRD kota Medan.
- Nama : Maslina Fitrianty Silegar, S.E
Jenis kelamin : Perempuan
Usia : 36 Tahun
Pendidikan : S1 Akuntansi
Jabatan : Staf Sub bagian keuangan BPPRD kota Medan.

3. Informan Tambahan

- Nama : Andy, S.E
Jenis kelamin : Laki-laki
Usia : 38 Tahun
Pendidikan : S1 Akuntansi
Jabatan : Staf pegawai keuangan (Non PNS) BPPRD kota Medan.
- Nama : Fauzan Shaufi, S.H
Jenis kelamin : Laki-laki
Usia : 26 Tahun
Pendidikan : S1 Hukum
Jabatan : Staf pegawai keuangan (Non PNS) BPPRD kota Medan.





UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate/Jalan PBSI Nomor 1 (061) 7366876, 7360168, 7364348, 7366781, Fax: (061) 7366898 Medan 20222
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 79 A, (061) 8201984, Fax: (061) 8225331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : /FIS.2/01.10/II/2021
Lamp : -
Hal : Pengambilan Data/Riset

15 Februari 2021

Yth,
Ka. Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang)
Jl. Kapten Maulana Lubis No.2 Medan

Dengan hormat,

Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan rekomendasi dan kesempatan kepada mahasiswa kami dengan data sebagai berikut :

Nama : Desi Mariana Br Simamora
N P M : 178520050
Program Studi : Administrasi Publik

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/riset di Kantor Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan (BPPRD), dengan judul Skripsi **"Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan"**

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian dimaksud adalah semata-mata untuk tulisan ilmiah dan penyusunan skripsi, ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa tersebut untuk mengikuti ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

Selanjutnya kami mohon kiranya dapat memberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan dan surat keterangan yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data pada Instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. Heri Kusmanto, MA

CC : File:-

**PEMERINTAH KOTA MEDAN**
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112
Telepon : (061) 4555693 Faks : (061) 4555693
E-mail : balitbangmedan@yahoo.co.id Website : balitbang.pemkomedan.go.id

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN
NOMOR : 070/1661/Balitbang/2021

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor : 55 Tahun 2010, tanggal 24 November 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dan setelah membaca/memperhatikan surat dari: Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area Nomor: 107/FIS.2/01.10/11/2021 Tanggal : 15 Februari 2021 Hal: Pengambilan Data/Riset.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dengan ini memberikan Surat Pengambilan Data/Riset Kepada :

Nama	: Desi Mariana Br. Simamora.
NPM	: 170520050.
Prodi	: Administrasi Publik.
Judul	: " Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan ".
Lokasi	: Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.
Lamanya	: 1 (satu) bulan.
Penanggung Jawab	: Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Penelitian terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah direkomendasikan.
4. Hasil penelitian diserahkan kepada Kepala Balitbang Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah penelitian dalam bentuk Soft Copy.
5. Surat rekomendasi penelitian dinyatakan batal apabila pemegang surat rekomendasi tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat rekomendasi penelitian ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan.
Pada Tanggal : 16 Februari 2021
Plt. Kepala Penelitian dan Pengembangan


Drs. SYARIFUDDIN H. HONGORAN, M.Si
PENYUSUN UJIAN MAHA (IV/c)
NIP. 1960040199009 1 001

Tembusan :

1. Walikota Medan, (sebagai laporan).
2. Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
4. Pertinggal.

**PEMERINTAH KOTA MEDAN**
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Jl. Jendral Besar H. Abdul Haris Nasution No. 32 Telp. (061) 7851694 - 7851695.
Medan - 20143

SURAT KETERANGAN
Nomor : 070. SC / 205 - 1

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BENNY SINOMBA SIREGAR, SE
Jabatan : Plt Sekretaris Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : DESI MARIANA Br SIMAMORA
NIM : 178520050
Program Studi : Administrasi Publik Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area

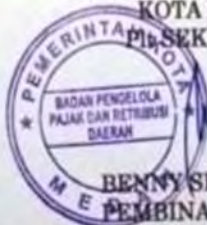
Berdasarkan Surat Rekomendasi Penelitian Nomor : 070 /1881/ Balitbang/ 2020 tanggal 16 Februari 2021, benar yang bersangkutan telah selesai melakukan Riset/ Penelitian di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Penelitian tersebut dimaksud sebagai Bahan/masukan bagi yang bersangkutan untuk Penyusunan / Penulisan Skripsi yang berjudul :

"Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan"

Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan, untuk dapat dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 16 Maret 2021

An. KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH
KOTA MEDAN
Plt. SEKRETARIS


BENNY SINOMBA SIREGAR, SE
PEMBINA
NIP. 19730601 200212 1 001



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate/Jalan PBSI Nomor 1 ☎ (061) 7366878, 7360168, 7364348, 7366781, Fax. (061) 7366998 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setia Budi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A, ☎ (061) 8201994, Fax. (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-mail: univ_medanarea@uma.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 17/FIS.02/1.7/IV/2021

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Beby Mashito Batubara, S.Sos, MAP
NIDN : 0722108602
Homepage : Universitas Medan Area

Menyatakan dengan ini benar bahwa saya telah melakukan pengecekan naskah skripsi dengan hasil plagiarisme melalui aplikasi **Plagiarism Checker** Sebesar **20 %** atas mahasiswa :

Nama : Desi Mariana Br Simamora
NPM : 178520050
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan

Demikian surat pernyataan ini diperbuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Medan, 27 April 2021



Beby Mashito Batubara, S.Sos, MAP